



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

LAPORAN BULANAN JUNI TAHUN 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Caya, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Jalan. Prof. Moh. Yamin, S.H., Nomor. 52, Kota Palu
Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan,
Palu, Sulawesi Tengah, 94231.

0451 - 483 385
0811 4444 064
ptun.palu@gmail.com
www.ptun-palu.go.id

LAPORAN BULANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU BULAN JUNI 2025



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 52 Palu, Kode Pos 94231

Telp. 0451 – 483385, 0811 4444 064 (CICA)

Website: ptunpalu.go.id

Email: ptunpalu@gmail.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan	4
A. Sejarah Singkat.....	4
B. Maksud dan Tujuan	6
Bab II Tugas Pokok dan Fungsi	7
A. Manajemen Kesekretariatan	7
1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	7
1.1. Struktur Organisasi	8
1.2. Sumber Daya Manusia	9
1.3. Promosi, Mutasi dan Pensiun.....	11
1.4. Pengelolaan Database SIKEP	12
2. Umum dan Keuangan	14
2.1. Tata Kearsipan dan Perpustakaan	14
2.1.1. Pengelolaan Persuratan.....	14
2.1.2. Pengelolaan Perpustakaan	15
2.1.3. Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan.....	15
2.2. Pengelolaan Aset dan BMN.....	15
2.2.1. Data Tanah, Gedung dan Kendaraan	16
2.2.2. Penetapan Status dan Penggunaan BMN	16
2.2.3. Pengalihan Status dan Penghapusan BMN	16
2.3. Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara	18
2.3.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	18
2.3.2. Laporan PNBPN	18
2.3.3. Data Persekot/Uang Muka Gaji	19
2.3.4. Ralat SPM.....	19
3. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	19
3.1. Revisi DIPA/POK.....	19
3.2. Pengelolaan Website dan Jaringan.....	19

B. Manajemen Kepaniteraan	20
1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara	20
1.1. Laporan Keadaan Perkara	20
1.2. Laporan Jenis Perkara	21
1.3. Laporan Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.....	21
2. Laporan Pelaksanaan SIPP	21
3. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan	22
4. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum	23
5. Tata Kelola Arsip Perkara.....	23
BAB III Kesimpulan dan Rekomendasi.....	24
A. Kesimpulan.....	24
B. Rekomendasi.....	24
LAMPIRAN.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1997 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak H. M. Soeharto.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu merupakan Pengadilan kelas I yang berkedudukan di Kota Palu dan beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 52 Palu.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang terjadi di Wilayah Hukumnya yang meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi:

1. Kota Palu
2. Kabupaten Banggai
3. Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kabupaten Banggai Laut
5. Kabupaten Buol
6. Kabupaten Donggala
7. Kabupaten Morowali
8. Kabupaten Morowali Utara
9. Kabupaten Parigi Moutong
10. Kabupaten Poso
11. Kabupaten Tojo Una-Una
12. Kabupaten Sigi
13. Kabupaten Tolitoli

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diresmikan bersama-sama dengan PTUN Palangkaraya, PTUN Bengkulu, PTUN Jambi, dan PTUN Kendari secara simbolis oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Muladi, S.H. pada tanggal 29 Oktober 1998 yang dipusatkan di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor dan sekaligus ditandai dengan mulainya beroperasi Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sejak beroperasi pada tahun 1998 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengalami pergantian pimpinan sebanyak 14 (empat belas) kali, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. JACOB GERUNGAN, S.H. | (1998 s.d. 1999) |
| 2. SUTOYO, S.H. | (1999 s.d. 2001) |
| 3. SULISTYO, S.H. | (2001 s.d. 2002) |
| 4. ACHMAD HUSEIN, S.H. | (2003 s.d. 2006) |
| 5. DILMAR TATAWI, S.H. | (2006 s.d. 2007) |
| 6. KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP. | (2007 s.d. 2010) |
| 7. NABARI SEMBIRING, S.H. | (2010 s.d. 2011) |
| 8. H. ASMORO BUDI SANTOSO, S.H. | (2011 s.d. 2012) |
| 9. H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. | (2012 s.d. 2015) |
| 10. FARI RUSTANDI, S.H., M.H. | (2015 s.d. 2020) |
| 11. NUR AKTI, S.H. | (2020 s.d. 2021) |
| 12. SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H. | (2022 s.d. 2023) |
| 13. DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H. | (2023 s.d. 2024) |
| 14. ROSIDAH, S.H. | (2024 s.d. sekarang) |

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di wilayah hukumnya dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

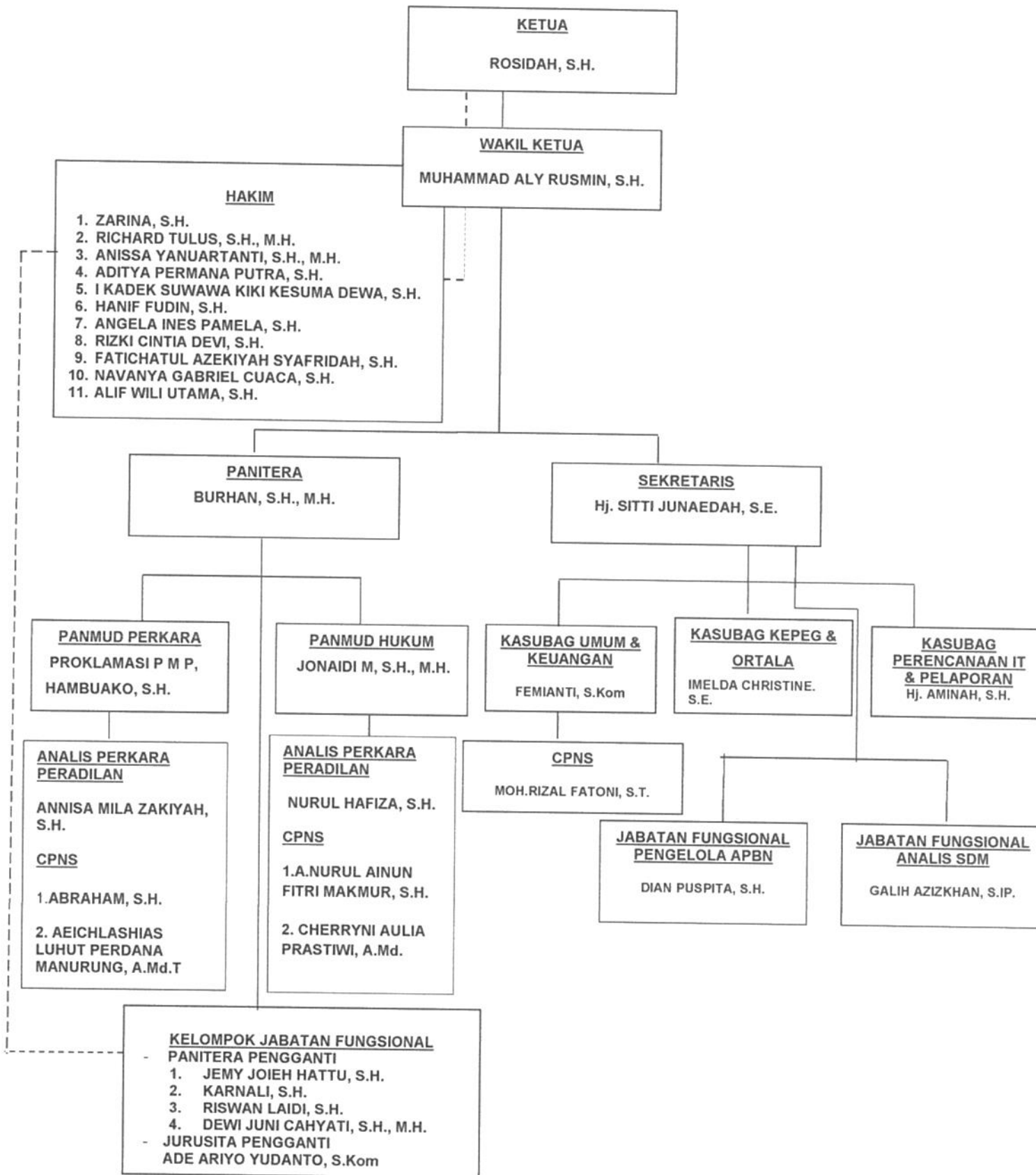
A. Manajemen Kesekretariatan

1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Susunan Struktur Organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
STRUKTUR ORGANISASI
 (Sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2015)



1.2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, Pegawai, dan Honorer (PPNPN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

Ketua	: 1 orang
Wakil Ketua	: 1 orang
Hakim	: 11 orang
Panitera	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Panitera Muda Perkara	: 1 orang
Panitera Muda Hukum	: 1 orang
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	: 1 orang
Kasub Umum dan Keuangan	: 1 orang
Kasub Perencanaan IT dan Pelaporan	: 1 orang
Fungsional SDM Ahli Pertama	: 1 orang
Fungsional Pengelola Keuangan APBN	: 1 orang
Panitera Pengganti	: 4 orang
Jurusita Pengganti	: 1 orang
Analisis Perkara Peradilan	: 2 orang
CPNS	: 5 orang
(PPNPN)	: 11 orang

Sedangkan susunan personil Pegawai dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Gol
1.	Ketua	Rosidah, S.H	IVc
2.	Wakil Ketua	Muhammad Aly Rusmin, S.H.	IV/b
3.	Hakim	Zarina, S.H.	IV/a
4.	Hakim	Richard Tulus, S.H., M.H.	III/b
5.	Hakim	Anissa Yanuartanti, S.H., M.H.	III/b
6.	Hakim	Aditya Permana Putra, S.H.	III/b
7.	Hakim	I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, S.H.	III/a
8.	Hakim	Hanif Fudin, S.H.	III/a
9.	Hakim	Angela Ines Pamela, S.H.	III/a

10.	Hakim	Rizki Cintia Devi, S.H.	III/a
11.	Hakim	Fatichatul Azekiyah Syafridah, S.H.	III/a
12.	Hakim	Navanya Gabriela Cuaca, S.H.	III/a
13.	Hakim	Akif Wili Utama, S.H.	III/a
14.	Sekretaris	Hj. Sitti Junaedah, S.E.	IV/b
15.	Panitera	Burhan, S.H., M.H.	IV/a
16.	Panitera Muda Perkara	Proklamasi PMP H, S.H.	III/d
17.	Panitera Muda Hukum	Jonaidi Madri, S.H., M.H.	III/d
18.	Kasub.Bag. PTIP	Hj. Aminah, S.H.	III/d
19.	Kasub.Bag. Umum & Keuangan	Femianti, S.Kom	III/d
20.	Kasub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	Imelda Christine, S.E.	III/d
21.	Panitera Pengganti	Jemmy Joeh Hattu, S.H.	III/c
22.	Panitera Pengganti	Karnali, S.H.	III/c
23.	Panitera Pengganti	Riswan Laidi, S.H.	III/a
24.	Panitera Pengganti	Dewi Juni Cahyati, S.H., M.H	III/b
25.	Fungsional SDM Ahli Pertama	Galih Azizkhan, S.IP.	III/b
26.	Fungsional Pengelola APBN	Dian Puspita, S.H.	III/a

27.	Jurusita Pengganti	Ade Ario Yudanto, S.Kom	III/a
28.	Analisis Perkara Peradilan	Annisa Mila Zakiya, S.H.	III/a
29.	Analisis Perkara Peradilan	Nurul Hafiza, S.H.	III/a
30.	CPNS Analisis Perkara Peradilan	A.Nurul Ainun Fitri Makmur, S.H.	III/a
31.	CPNS Analisis Perkara Peradilan	Abraham, S.H.	III/a
32.	CPNS Analisis Perkara Peradilan	Moh Rizal Fatoni, S.T.	III/a
33.	CPNS Analisis Dokumentasi Hukum	Aeichlashias Luhut Perdana Manurung, A.Md.	II/c
34.	CPNS Analisis Dokumentasi Hukum	Cheryani Aulia Prastiwi, A.Md.	II/c

Jabatan Fungsional yang diperbantukan pada Jabatan Administrasi

No	Nama	Jabatan	Diperbantukan pada
-	-	-	-

Tenaga Honorer (PPNPN)

No	Nama	Tugas	Diperbantukan pada
1	Frangky Atimang	Satpam	Hukum
2	Samsul Bahri	Satpam	Hukum
3	Faldy Abraham	Satpam	Hukum & Umum/Keuangan

4	Sukarno	Satpam	Umum & Keuangan
5	Moh Fauzan, S.Pd.I, S.H.	Sopir	Perkara& Admin SIPP
6	Ulil Amri, S.E.	Sopir	Umum & Keuangan
7	Ade Chandra Permana, S.Si	Pramubakti	Umum & Keuangan
8	Moh Fachri Darmawan, S.H.	Pramubakti	PTIP
9	Achmad Reyza, S.H.	Pramubakti	Perkara
10	Nur Ramadhan, A.Md.Ml., S.H.	Pramubakti	PTIP
11	Winda, S.E.	Pramubakti	Perkara

1.3. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Pejabat dan atau pegawai yang mendapat promosi atau mutasi adalah sebagai berikut:

Data Promosi dan Mutasi

No	Nama	Asal Mutasi	Mutasi
-	-	-	-

Pejabat dan atau pegawai yang memasuki masa pensiun adalah sebagai berikut:

Data Pegawai Memasuki Masa Pensiun

No	Nama	Masa Kerja	TMT Pensiun
-	-	-	-

1.4. Pengelolaan Database SIKEP

Database SIKEP dikelola oleh Kasub Kepegawaian dan Ortala sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Pemutakhiran database SIKEP dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh Saudari Imelda Christine, S.E. Sebagai user administrator satuan kerja.

Hasil rekapitulasi kelengkapan database Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada aplikasi sikep adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Database Sikep

No	Nama	Status	Ket
1.	Rosidah, S.H	Lengkap	-
2.	Muhammad Aly Rusmin, S.H.	Lengkap	-
3.	Zarina, S.H.	Lengkap	-
4.	Richard Tulus, S.H., M.H.	Lengkap	-
5.	Anissa Yanuartanti, S.H., M.H.	Lengkap	-
6.	Aditya Permana Putra, S.H.	Lengkap	-
7.	I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, S.H.	Lengkap	-
8.	Hanif Fudin, S.H.	Lengkap	-
9.	Angela Ines Pamela, S.H.	Lengkap	-
10.	Rizki Cintia Devi, S.H.	Lengkap	-
11.	Fatichatul Azekiyah Syafridah, S.H.	Lengkap	-
12.	Navanya Gabriela Cuaca, S.H.	Lengkap	-
13.	Akif Wili Utama, S.H.	Lengkap	-
14.	Hj. Sitti Junaedah, S.E.	Lengkap	-
15.	Burhan, S.H., M.H.	Lengkap	-
16.	Proklamasi PMP H, S.H.	Lengkap	-
17.	Jonaidi Madri, S.H., M.H.	Lengkap	-
18.	Hj. Aminah, S.H.	Lengkap	-
19.	Femianti, S.Kom	Lengkap	-
20.	Imelda Christine, S.E.	Lengkap	-
21.	Jemmy Joeh Hattu, S.H.	Lengkap	-
22.	Karnali, S.H.	Lengkap	-
23.	Riswan Laidi, S.H.	Lengkap	-
24.	Dewi Juni Cahyati, S.H., M.H	Lengkap	-
25.	Galih Azizkhan, S.IP.	Lengkap	-
26.	Dian Puspita, S.H.	Lengkap	-
27.	Ade Ario Yudanto, S.Kom	Lengkap	-
28.	Annisa Mila Zakiya, S.H.	Lengkap	-
29.	Nurul Hafiza, S.H.	Lengkap	-
30.	A.Nurul Ainun Fitri Makmur, S.H.	Lengkap	-

31.	Abraham, S.H.	Lengkap	-
32.	Moh Rizal Fatoni, S.T.	Lengkap	-
33.	Aeichlashias Luhut Perdana Manurung, A.Md.	Lengkap	-
34.	Cheryani Aulia Prastiwi, A.Md.	Lengkap	-

2. Umum dan Keuangan

2.1. Tata Kearsipan dan Perpustakaan

2.1.1. Pengelolaan Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat masuk dan surat keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian umum dan keuangan. Data statistik surat masuk dan surat keluar periode Juni 2025:

Data Surat Masuk dan Surat Keluar

No	Bagian	Jumlah	
		Surat masuk	Surat keluar
	Kesekretariatan	-	-
1	Ketua	42	87
2	Sekretaris	2	33
	Kepaniteraan	-	-
1	Ketua	8	4
2	Panitera	-	17
	Jumlah	557	141

2.1.2. Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan di bawah kendali Umum dan Keuangan dan sebagai petugas kepustakaan (pustakawan) telah ditunjuk 2 (dua) orang PPNP sebagai petugas pengelolaan perpustakaan sesuai dengan Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 176/KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan Juni 2025 berjumlah (909) buah. Pengelolaan database perpustakaan dicatat ke dalam buku register pustaka. Pengelolaan database

secara elektronik sudah dilakukan melalui aplikasi **SLIM Senayan**. Untuk pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi sebagian telah dilakukan.

2.1.3. Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan

Perlengkapan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih sangat kurang. Sarana dan Prasarana yang tersedia baru terbatas pada penyediaan ruangan khusus perpustakaan, lemari arsip buku. Sedangkan meja dan kursi petugas dan meja baca untuk pengunjung belum tersedia.

2.2. Pengelolaan Aset dan BMN

2.2.1. Data Tanah, Gedung dan Kendaraan

- Tanah Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu seluas 3.250 m², Luas Gedung 2.281.63 m², tanah rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu seluas 2.123 m² terletak di Jalan Kijang Raya Nomor 47 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Data Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai berikut:

No	Type	Tahun	Luas Tanah	Luas Bangunan
1	C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²
2	C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²
3	C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²
4	C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²
5	C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²
6	C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²
7	C Permanen	2003	265 m ²	77 m ²
8	C Permanen	2003	265 m ²	77 m ²

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

1. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m² untuk Ketua
2. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m² untuk Wakil Ketua
3. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m² untuk Hakim
4. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m² untuk Hakim
5. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m² untuk Hakim

6. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m² untuk Hakim
 7. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m² untuk Sekretaris
 8. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m² untuk Panitera.
- Kendaraan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terdiri dari roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dan sudah dibuatkan SK Penggunaan Kendaraan Dinas.
 - Data kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai berikut:

No	Nama Aset	Tahun	Kondisi	Pengguna
1	Toyota Vios	2007	RR	Ketua
2	Toyota KF 80	2001	RB	Sekretaris/ Operasional
3	Honda NF 125 D	2006	RR	Panmud Perkara
4	Honda Supra 125 SFC	2007	Baik	Panmud Hukum
5	Honda Revo	2009	Baik	Panitera
6	Honda Revo	2009	Baik	Kasubbag PTIP
7	Honda Revo	2009	Baik	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
8	Honda Supra NF 125 TRF	2008	Baik	Kasubbag Umum dan Keuangan
9	Honda GL Pro	2006	RR	Panitera Pengganti

2.2.2. Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Penetapan Status dan Penggunaan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Nomor: 369/Sek/SK.PL1.2/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 selain tanah dan/atau bangunan dan kendaraan bermotor;

2. Nomor: 105/KM.6 /KNL.1603/2024 tanggal 29 Mei 2024 berupa tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;
3. Nomor: 912/Sek/SK.PL.1.2/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 selain tanah/atau bangunan;
4. Nomor: 146/KM.6/knl.1603/2024 tanggal 15 Juli 2024 berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dititipkan status penggunaannya pada Mahkamah Agung RI.

2.2.3. Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

- Tidak ada pengalihan status Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1670/Sek/SK.PL.1.2.3/XII/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara berupa gedung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

2.3 Laporan Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara

2.3.1 Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan pos belanja:

Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Juni 2025

No	Belanja	DIPA (005.01)	Realisasi		Sisa
			Bulan ini	S.d. Bln ini	
1	Pegawai(51)	3.652.382.000,-	595.441.992,-	2.304.963.343,-	1.347.418.657,-
2	Barang(52)	1.191.461.000,-	92.671.117,-	485.359.901,-	707.101.099,-
3	Modal(53)	120.000.000,-	0,-	0,-	120.000.000,-

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan pos belanja:

Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan Juni 2025

No	Belanja	DIPA (005.05)	Realisasi		Sisa
			Bulan ini	S.d. Bln ini	
1	Barang (52)	69.703.000,-	2.400.000,-	16.925.000,-	52.778.000,-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran.

2.3.2 Laporan PNBP

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode Bulan Juni 2025 secara umum sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan PNBP

No	Akun	Jenis Pendapatan	Bulan lalu	Bulan ini
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	892.800,-	892.800,-
2	423911	Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3	423991	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0
4	425232	Uang Meja (Leges)	250.000,-	60.000,-
5	425233	Ongkos Perkara	480.000,-	140.000,-

6	425239	Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.465.000,-	481.000,-
		Total	3.087.800,-	1.573.800,-

Laporan realisasi PNBPN secara rinci dapat dilihat pada tabel lampiran.

2.3.3. Data persekot/Uang Muka Gaji

Tidak ada Pegawai dan Hakim mengajukan persekot gaji pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

2.3.4. Ralat SPM

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak melakukan ralat SPM.

3. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

3.1. Revisi DIPA/POK

Pada Bulan Juni 2025 telah dilaksanakan revisi keempat DIPA 01 dan revisi ketiga DIPA 05

3.2. Pengelolaan Website dan Jaringan

- Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggung jawab pengelolaan ada pada Kasubag PTIP. PTUN Palu menggunakan penyedia layanan internet dari Telkom, dengan paket astinet Dedicated 30 Mbps dan Broadband 200 Mbps. Nomor: K.TEL.1097/HK.810/DR7-1A200000/2024 Tipe Permintaan layanan baru.
- Kondisi jaringan internet pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sampai saat ini masih memadai untuk penggunaan layanan.

B. Manajemen Kepaniteraan

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode Bulan Juni 2025 sebagai berikut:

No	Perkara	Sisa Bln lalu	Masuk bln ini	Putus bln ini	Sisa bln ini	Keterangan			
						Cabut	Gugur	PLW	Dis misal
1	Gugatan	4	3	1	6	-	-	1	-
2	Banding	3	-	3	-	-	-	-	-
3	Kasasi	7	2	2	7	-	-	-	-
4	PK	2	-	-	2	-	-	-	-
5	Eksekusi	14	-	-	14	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode Bulan Juni 2025 sebagai berikut:

Laporan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Sisa bulan lalu	Masuk	Diss-misal	Cabut	Ditolak	Putusan		Sisa bulan ini
							Dikabulkan	Tidak diterima	
1	Pertanahan	2	1	-	-	-	-	1	2
2	Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang & Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum /Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	-	-	-	-	-	-	1
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pergantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-

12	Sengketa Informasi Publik/KIP	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	2	-	-	-	-	-	2
17	Merek	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Lain-lain	1	-	-	-	-	-	-	1
	Total	4	3	-	-	-	-	1	6

1.3. Laporan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Laporan Jumlah Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode Bulan Juni 2025, yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Laporan Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum

No	Perkara yang mengajukan	Sisa Bln Lalu	Masuk Bulan Ini	Putus	Sisa Bln ini
1	Banding	3	-	3	-
2	Kasasi	7	2	2	7
3	Peninjauan Kembali	2	-	-	2
	Total	12	2	5	9

2. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh *stakeholder* yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah SIPP Versi 5.6.6, Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan Juni 2025 adalah sebesar **33.33%** (*data dari SIPP MA*).

3. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah memiliki sarana meja Informasi dan Pengaduan, dan Petugas Meja Informasi dan Pengaduan sudah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 21/KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/II/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 32/KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/II/2025, tanggal 24 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Sarana lainnya adalah tersedianya buku register meja informasi, blangko-blangko permohonan. Untuk Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SPAN sudah menggunakan aplikasi Whistle Blowing System Mahkamah Agung RI yaitu aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI).

Permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode bulan Juni 2025 nihil.

Buku Register Informasi

No	Pemohon	Tgl diterima	Objek permohonan	Tindak Lanjut
-	-	-	-	-

Jumlah pengaduan pada Bulan Juni 2025 yang telah masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah Nihil.

Buku Register Pengaduan

No	Sumber Pengaduan	Tgl diterima	Subjek	No. Register
-	-	-	-	-

4. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama Kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Lembaga Pemberi Layanan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Laporan penyerapan Anggaran Posbakum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dapat dilihat pada lembar lampiran.

5. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan ke dalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada Kepaniteraan Muda Perkara, sedangkan arsip perkara in aktif (berkekuatan hukum tetap), dilimpahkan ke Kepaniteraan Muda Hukum untuk selanjutnya diarsipkan di ruang arsip perkara.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Bagian Kesekretariatan Tugas dan Fungsinya sudah berjalan dengan baik, dalam hal ini untuk Bagian Perencanaan dan Teknologi Informasi sudah melakukan revisi keempat Tahun Anggaran 2025 yaitu DIPA 01 dan revisi ketiga DIPA 05. Pada Bagian Umum dan Keuangan realisasi anggaran DIPA 01 sebesar 56.20% dan DIPA 05 sebesar 24.28%;
2. Bagian Kepaniteraan pada bulan Juni perkara yang masuk 3 (tiga), sehingga sisa bulan ini sejumlah 6 (enam) perkara.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan penambahan 3 (tiga) unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) untuk Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris, dan Kendaraan Operasional Dinas roda 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) unit untuk kendaraan Bendahara dan Jurusita Pengganti dalam upaya kelancaran aktivitas kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Demikian Laporan Bulanan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Rosidah



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPN DIPA 005.05